Benturan- benturan Misi Gereja Katolik

Peter B. Sarbini

STFT Widya Sasana Malang
Email : peterbrunosarbini@gmail.com

Recieved: 28 Oktober 2022 Revised: 11 November 2022 Published: 12 Desember 2022

Abstract

The journey and mission of the Catholic Church has always faced various challenges and clashes, both from within itself and from outside. The Church is often viewed and judged by certain parties with the stigma of enclosure that claims itself as the only way and source of salvation (*extra ecclesiam nulla salus*). Furthermore, Pope Francis emphasized to religious leaders to promote a culture of peace, not to justify and legalize violence, and the need to resolve conflicts not with the tools of power, weapons and threats, but in ways that are approved by heaven and humanity, namely through dialogue, meetings and correct negotiations. God, the Creator of life, whom we worship, makes us realize that religions do not permit the destruction of life itself. No religion should legalize and justify war for any reason. Followers of any religion must promote a culture of peace, not violence using the tools of power. Then, how is the existence and works of the Church that wants to introduce itself, not exclusive and relevant in the midst of diversity of religions, cultures, ethnicities, etc.? What challenges and clashes does the Church face, especially in this beloved country? How does the Church respond to and overcome various clashes against its works and mission? This paper describes and tries to find answers to some of these questions and problems.

Keywords: Church, religious freedom, licensing, house of worship, Fratelli Tutti

Abstrak

Perjalanan dan misi Gereja Katolik senantiasa menghadapi beragam tantangan dan benturan, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar. Gereja sering dipandang dan dinilai oleh pihak-pihak tertentu dengan stigma ketertutupan yang meng-*claim* dirinya sebagai satu-satunya jalan serta sumber keselamatan (*extra ecclesiam nulla salus*). Lebih lanjut, Paus Fransiskus menekankan kepada para pemuka agama

untuk mempromosikan budaya damai, tidak membenarkan dan melegalkan kekerasan, serta perlunya menyelesaikan konflik bukan dengan alat kekuasaan, senjata dan ancaman, melainkan dengan cara yang direstui surga dan kemanusiaan, yakni melalui dialog, pertemuan serta negosiasi yang benar. Allah Sang Pencipta kehidupan yang kita sembah menyadarkan para penganut agama tidak mengizinkan penghancuran kehidupan itu sendiri. Agama apapun tidak boleh melegalkan dan membenarkan perang dengan alasan apa saja. Para penganut agama apapun harus mengedepankan budaya damai, bukan kekerasan dengan menggunakan alat kekuasaan. Lalu, bagaimanakah keberadaan dan karya-karya Gereja yang mau memperkenalkan diri, tidak eksklusif dan relevan di tengah keragaman agama, budaya, suku dll? Tantangan-tantangan dan benturan apa saja yang dihadapi Gereja, utamanya di negara tercinta ini? Bagaimana Gereja menyikapi dan mengatasi berbagai benturan terhadap karya-karya serta misinya? Tulisan ini menguraikan dan berusaha menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan dan persoalan tersebut.

Kata Kunci : Gereja, kebebasan beragama, perijinan, rumah ibadah, Fratelli Tutti

1. Pendahuluan

Paus Fransiskus, Pemimpin Gereja Katolik Roma belum lama ini berbicara dalam Kongres ke-7 para pemimpin agama dunia dan tradisional di Kazakhstan pada Rabu, 14 September 2022. Tercatat 80 pemimpin agama di dunia hadir dalam acara tersebut. Paus membuka pidatonya dengan menantang para delegasi untuk bersatu mengancam perang dan pembenaran agama atas perang itu. Agama tidak boleh dipakai untuk membenarkan perang. Agama juga jangan sampai disandera oleh keinginan manusia yang haus kuasa. Selain itu, Paus menekankan kepada para pemuka agama untuk mempromosikan budaya damai, tidak membenarkan dan melegalkan kekerasan, serta perlunya menyelesaikan konflik bukan dengan alat kekuasaan, senjata dan ancaman, melainkan dengan cara yang direstui surga dan kemanusiaan, yakni melalui dialog, pertemuan serta negosiasi yang benar. Allah Sang Pencipta kehidupan yang kita sembah menyadarkan para penganut agama tidak mengizinkan penghancuran kehidupan itu sendiri.

Penegasan dan ajakan Paus di atas mengajak para pemimpin agama dunia dan memperlihatkan wajah (pemimpin) Gereja Katolik mengancam perang. Agama apapun tidak boleh melegalkan dan membenarkan perang dengan alasan apa saja. Para penganut agama apapun harus mengedepankan budaya damai, bukan kekerasan dengan menggunakan alat kekuasaan. Harapan tersebut belum bisa terealisasi bila mengamati konflik tanpa henti dan penggusuran oleh Israel menjadi sumber ancaman nyata di Yerusalem. Israel terus menggusur wilayah-wilayah yang dihuni warga Muslim dan Kristen. Persoalan inilah yang diangkat oleh Raja Jordania Abdullah II dalam Sidang Majelis Umum PBB (Selasa, 20/9/2022), yakni keberadaan gereja-gereja di wilayah tersebut. Hak-hak gereja dan warisan Kristiani di Yerusalem terus terancam. Upaya melemahkan status

hukum dan sejarah kota tua itu menjadi penyebab utama ancaman tersebut. Kekristenan dan hak-hak gereja di Kota Suci Yerusalem tengah terancam. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Kekristenan adalah unsur penting bagi masa lalu dan masa kini kawasan kita dan Tanah Suci, demikian ditegaskan Raja Abdullah II. Ia mengaku cemas atas perkembangan di Yerusalem. Kota tua itu penting bagi miliaran umat Islam, Kristen dan Yahudi di berbagai negara. Konflik tanpa henti ditambah aneka penggusuran wilayah-wilayah oleh Israel yang dihuni pemeluk Islam dan Kristen. Hal ini menjadi sumber ancaman serius di Yerusalem. Konflik dan ancaman harus segera diselesaikan agar tidak ada penyalahgunaan potensi dan energi kawasan.

2. Pembahasan

2.1 Benturan-benturan terhadap Misi Gereja

2.1.1. Perijinan Rumah Ibadah dan Kebebasan Beragama

Misi Gereja tidak luput dari unsur kekerasan dan benturan-benturan dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Berikut ini beberapa contoh dan kejadian nyata benturan-benturan terhadap misi Gereja Katolik utamanya di Indonesia. Misalnya, benturan yang berkaitan dengan masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan hanya merupakan urusan negara atau LSM-LSM yang bergerak dalam advokasi HAM, tetapi juga tanggung jawab dari umat beragama, baik secara internal di dalam komunitas agamanya sendiri, maupun secara eksternal dengan para penganut agama-agama lain. Singkatnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan tanggung jawab serta kewajiban seluruh pihak, yaitu negara, *civil society*, dan umat beragama itu sendiri. Hal tersebut ditegaskan oleh mendiang Azyumardi Azra.

Hambatan atau kendala dalam aktualisasi kebebasan beragama dan berkeyakinan (*freedom of religion and belief*) boleh jadi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta kebijakan-kebijakan tertentu negara yang menyebabkan individu atau masyarakat tertentu terhalangi dan tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan agama serta keyakinan yang mereka anut. Kendala terhadap kebebasan agama dan keyakinan antara lain terletak pada ketidakmampuan negara menegakkan undang-undang, ketentuan serta peraturan hukum, baik nasional maupun internasional (yang sudah diratifikasi) dalam kehidupan aktual umat beragama. Dengan kata lain, sebetulnya negara telah memiliki dasar legalitas dan kelengkapan hukum yang diperlukan untuk terlaksananya kebebasan agama serta keyakinan, namun kebebasan itu tidak bisa terwujud karena kurangnya kemauan politik penguasa atau engganannya aparat penegak hukum dalam menjamin aktualisasi kebebasan agama dan keyakinan tersebut. Untuk itu diperlukan peningkatan peran dan aktivisme masyarakat sipil serta para umat beragama itu sendiri untuk dapat melakukan tekanan-tekanan

kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi mereka menegakkan hukum serta menjamin kebebasan beragama.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan boleh jadi mengalami hambatan dari bagian tertentu dalam masyarakat keagamaan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi di antara umat beragama yang berbeda, bahkan di antara berbagai mazhab, aliran atau denominasi dalam agama tertentu. Tidak jarang kelompok agama yang dominan dalam suatu negara-bangsa tertentu melakukan tindakan-tindakan depresif membatasi dan menghalangi kebebasan agama dan pendirian rumah ibadah. Berhadapan dengan permasalahan tersebut, maka seluruh pihak, utamanya *stake holders* perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar serta komprehensif supaya kebebasan beragama, berkeyakinan dan pendirian rumah ibadah bisa teraktualisasi dengan benar. Kebebasan beragama, berkeyakinan dan pendirian rumah ibadah masih perlu diperjuangkan terus-menerus tanpa mengenal lelah pada berbagai level kehidupan.

Situasi dan persoalan di atas terbukti nyata dalam bentuk penolakan pendirian rumah ibadah (Gereja HKBP Maranatha) yang belum lama ini terjadi di Kota Cilegon yang meninggalkan luka mendalam dan menampar kebebasan beragama yang telah digaransi oleh konstitusi. Penolakan tersebut menjadi penyebab Indeks Toleransi di Cilegon selalu rendah. Menurut laporan Setara Institut, Indeks Toleransi di Kota Cilegon masih jauh dari kondisi ideal, yakni nomor 15 dari bawah pada tahun 2015, nomor 4 dari bawah pada 2017 dan 2018, nomor 8 dari bawah pada 2020, dan nomor 3 dari bawah pada 2021 (*Kompas*, 27/9/2022). Indeks Toleransi memberikan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi.

Sikap penolakan di atas tak jarang menyulut aksi pembalasan (*efek domino*) terhadap kelompok minoritas ketika mereka hendak mendirikan rumah ibadah di daerah mayoritas agama tertentu. Pola relasi antar-umat beragama yang tidak sehat dan kondusif ini sudah saatnya dihentikan. Masdar Hilmy, Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, serta Dewan Penasihat ISNU Jawa Timur, memaparkan catatan sejarah berkenaan dengan peristiwa di atas. Penolakan terhadap pendirian rumah ibadah umat Kristiani di Cilegon ternyata bukan kali ini saja terjadi. Menurut catatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pemerintah Kota Cilegon telah menolak 4 (empat) kali pengajuan izin pendirian Gereja HKBP Maranatha sejak 2006 dan 5 (lima) kali menolak pengajuan pendirian izin Gereja Baptis Indonesia (GBI) Cilegon sejak 1995. Dari catatan penolakan ini, rasanya ada sesuatu yang tidak sehat dalam kehidupan beragama di kota ini. Pendirian rumah ibadah (gereja), kebebasan dan toleransi beragama di Kota Cilegon diduga terkait erat dengan independensi sikap pejabat di sana (baca: wali kota Cilegon) yang takut kehilangan dukungan politik dari basis pemilihnya. Independensi seorang pejabat publik telah tersandera oleh politik elektoral yang bersifat parsial. Sebagai akibatnya, pemimpin daerah terpilih tidak memiliki otonomi dan

independensi dalam menjalankan kebijakan politiknya yang seharusnya bersifat universal, imparial, adil dan merata bagi semua warga. Pemimpin terpilih tidak lagi menjadi milik para pemilihnya semata, tetapi milik semua warga, tanpa kecuali (*Kompas*, 27/9/2022, hlm. 4).

Pelanggaran terhadap kebebasan beragama dalam demokrasi elektoral seperti Indonesia yang dilakukan aktor non-negara yang justru dibiarkan dan dilindungi oleh aktor negara (pemerintah) dapat dikategorikan sebagai tindak pembiaran oleh negara (*act of mission*). Memang negara tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran terhadap kebebasan beragama, tetapi ketidakmampuan negara memberikan jaminan beribadah kepada warganya dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM dengan kategori tindakan pembiaran. Dalam konteks penegakan HAM, keterlibatan negara (pemerintah) dalam penolakan pendirian rumah ibadah dapat meningkatkan derajat pelanggaran HAM dari sekedar *act of mission* menjadi tindakan melakukan (*act of commission*). Dalam demokrasi elektoral semacam itu, para pemimpin terpilih dengan imbalan kebijakan publik yang hanya berpihak kepada para pemilih demi kenyamanan dan privilese terbatas yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir pemilih (Kaare Storm dan Wolfgang C Muller: 1999: 21).

Apa pun alasannya, penolakan pendirian rumah ibadah tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi kita, UUD 1945. Pasal 28E Ayat (1) dalam UUD 1945 secara jelas ditegaskan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Lebih tegas dan jelas dalam Pasal 29 Ayat (2) dinyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Penolakan di atas sebagaimana dinyatakan oleh Masdar Hilmy, sangat mencederai hak dasar beragama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengelompokkan hak beragama sebagai hak setiap orang yang tidak bisa ditunda (*non-derogable rights*) oleh dan dengan alasan apa pun, baik dalam kondisi damai maupun perang. Di Indonesia, konsep kebebasan beragama sebagai *non-derogable rights* diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 4) yang menjamin hak beragama sebagai perwujudan HAM yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun (Masdar Hilmy, 2022: 4).

2.1.2 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kehadiran Gereja bukan hanya menghadapi beragam tantangan dan kesulitan terkait kebebasan beragama serta perijinan rumah ibadah, tetapi juga penolakan dalam bentuk lain, bahkan kehadirannya dirasakan serta dianggap

sebagai ancaman dan “musuh”. Penelitian yang sangat menarik terkait masalah ini pernah dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Setara Institut.

Hasil penelitian LSI menjelang pemilu tahun 2019 terhadap 20 Provinsi di Indonesia tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tahun 2017 terjadi 80 peristiwa pelanggaran dengan 99 tindakan pelanggaran. Tahun 2018 tercatat 109 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 136 tindakan pelanggaran. Selama dua tahun itu pelanggaran kebebasan beragama meningkat. Pelaku pelanggaran didominasi oleh masyarakat akar rumput (*grass root*) yang diprovokasi oleh elite politik.

Beberapa tempat terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dicatat dari hasil penelitian tersebut, yaitu 1) DKI Jakarta: 23 peristiwa pelanggaran, 2) Jawa Barat: 19 kasus pelanggaran, 3) Jawa Timur : 15 kasus, 4) Yogyakarta: 9 kasus, 5) NTB : 7 Kasus, 6) Jawa Tengah : 6 kasus, dan 7) Sumatera Utara : 6 kasus pelanggaran. Banyaknya angka dan jumlah kasus/peristiwa pelanggar tersebut, terdiri dari beragam jenis tindakan pelanggaran yang meliputi (a) intoleransi : 16 tindakan, (b) penodaan agama : 10 tindakan, (c) Ujaran kebencian : 7 tindakan, (d) diskriminasi : 5 tindakan.

2.1.1.1 Gangguan terhadap rumah ibadah dan golongan tertentu

Pada tahun 2018 Setara Institut mengadakan penelitian terkait rumah ibadah. Hasil penelitian mencatat dan melaporkan terdapat 20 gangguan terhadap rumah ibadah, yaitu 13 gangguan menimpa gereja, 4 gangguan menimpa masjid, 2 kali gangguan menimpa pura, dan 1 kali gangguan menimpa klenteng. Tampak jelas bahwa angka tertinggi berkenaan rumah ibadah adalah gangguan yang menimpa gereja.

Muncul pertanyaan, mengapa gangguan paling banyak menimpa gereja umat Kristiani? Jawaban atas pertanyaan ini bisa kita simak dan cermati dari hasil penelitian yang diadakan *The Wahid Institute Survey* terhadap 1.520 responden tentang kerawanan intoleransi di Indonesia. Hasil *survey* menunjukkan angka **59,9 %** merupakan kelompok yang dibenci. Mereka itu adalah golongan non-Muslim, yaitu Tionghoa, Komunis, Kristiani dan kelompok-kelompok lainnya yang tidak sealian. Dari angka atau jumlah 59,9 % ini, sebanyak **92,2%** tidak menyetujui jikalau kelompok yang dibenci tersebut hidup di wilayah mereka apalagi bertetangga atau hidup berdampingan. Mereka juga tidak menerima seandainya kelompok non-Muslim berkecimpung dan terlibat di ranah politik atau pejabat pemerintahan di Indonesia.

Kedua *survey* di atas sangat mengusik kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara di negeri ini. Bukankah umat beragama yang beragam di negara ini pernah berjuang bersama melawan dan mengusir penjajah demi kemerdekaan Indonesia? Tidak sadarkah bahwa kita ini hidup dan dijiwai spirit Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, serta menjaga NKRI? Ataukah sebagian umat

beragama sudah melupakan pernyataan mendiang almarhum Gus Dur yang pernah mengatakan bahwa negara ini bukanlah Indonesia jikalau tidak ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindhu dll? Ada ayat dalam Kitab Suci Alquran yang menyebutkan, “bila Allah SWT mau dan menghendaki, maka DIA bisa saja menciptakan umatNya itu satu dan sama. Namun Allah tidak mau. Justru umat manusia diciptakanNya secara berbeda-beda supaya saling berlomba-lomba berbuat kebaikan dan saling melengkapi”.

Di kalangan masyarakat luas terdapat banyak orang yang sedang “mabuk” agama dengan semangat keagamaan yang tinggi dan berkobar-kobar, tetapi pemahaman, pengetahuan keagamaan dan penafsirannya kadang dangkal. Tidak sedikit dari mereka akhirnya tergiring dan terbawa arus ke dalam fanatisme sempit, intoleransi serta kepicikan *mindset* dan tindakan ekstrim. Perbedaan dan keragaman umat beragama tidak lagi dilihat serta disadari sebagai saudara dalam kasih dan kemanusiaan, namun dirasakan sebagai saingan serta batu sandungan. Banyak orang menamakan diri beragama dan ber-Tuhan, de facto mereka tidak siap dan tidak mau hidup berdampingan serta bersaudara di tengah perbedaan keyakinan dan kebhinekaan. Bibit-bibit dan akar-akar kebencian, intoleransi, pelanggaran kebebasan beragama serta kesulitan memperoleh ijin pendirian rumah ibadah akan semakin tertanam kuat apabila tidak dicabut dan dibongkar tuntas serta diganti dengan sikap dan cara beragama yang moderat, toleran, inklusif serta pergaulan yang luas.

2.1.1.2 Radikalisme

Benturan dan tantangan lain yang dihadapi dan perlu disikapi oleh Gereja adalah radikalisme. Radikalisme dalam konstitusi dan hukum adalah paham yang ingin membongkar total ideologi serta konstitusi yang sudah disepakati rakyat melalui mekanisme yang terbuka. Ekspresi radikalisme muncul dalam tiga bentuk, yakni intoleransi, pengembangan wacana anti-ideologi dan konstitusi, serta terorisme.

Pemerintah menangani radikalisme sesuai dengan bentuk pemunculannya. Jika yang dihadapi intoleransi dan anti-ideologi yang sifatnya wacana, maka dilakukan melalui pendidikan kesadaran ideologi serta konstitusi, antara lain dengan mengembangkan kontranarasi, deradikalisasi, dan memperkuat pendidikan ideologi serta kewarganegaraan. Apabila radikalisme yang muncul dalam bentuk terorisme, maka tindakan pemerintah juga tegas, yaitu membuat kebijakan antiterorisme dengan segala mekanisme penindakan hukumnya. Kaum Muslimin mendukung kebijakan antiradikalisme dan perang terhadap terorisme justru untuk menunjukkan bahwa dalam ber-negara dan bermasyarakat, Islam bukanlah agama radikal apalagi teroris, melainkan agama *rahmatan lil alamin* yang mengajarkan kedamaian serta toleransi yang umatnya memosisikan diri dalam *wasathiyah* Islam (Moh Mahfud MD, 2022: 4). Perlu kita pikirkan bersama bagaimana Gereja menyikapi dan mencari solusi

terhadap berbagai gerakan radikal ini untuk kehadiran serta karya-karya pelayanan Gereja, baik saat ini maupun masa-masa yang akan datang.

2.1.1.3 Penistaan agama dan ujaran kebencian

Pertanyaan yang sering muncul, mengapa Gereja (umat) Katolik berdiam diri ketika agama dan ajarannya direndahkan, dihina dan dicaci-maki? Sementara itu pihak tertentu dengan bangga hati dan merasa puas diri terus-menerus menista ajaran agama lain serta menebarkan ujaran kebencian atas nama agama. Penyebaran dan pengajaran agama dengan maksud serta tujuan baik sering disertai cara yang tidak terpuji bahkan sangat menyakiti penganut agama tertentu. Contoh sederhana terkait pernyataan bahwa di salib ada jin kafir, siapa bidan bagi kelahiran Isa Al Masih dan lain-lain. Masih banyak lagi pengajaran dan penyebaran ajaran agama yang disajikan dengan menodai serta menjelek-jelekan agama-agama lain. Tidak sedikit dari mereka yang sudah diproses secara hukum dan dipenjara. Apakah pengajaran dengan cara yang seperti itu mendatangkan daya pikat atau daya tarik? Jangan- jangan ada motivasi lain dan *hidden agenda* demi popularitas dan pengakuan dirinya olah khalayak ramai.

Islam dengan tegas mengajarkan dan melarang menjelek-jelekan pihak lain karena pihak yang direndahkan serta dijelek-jelekan belum tentu hidup mereka lebih buruk daripada pihak yang menjelekkkan. Kehadiran dan karya Gereja akan terus berhadapan dengan ujaran kebencian serta penistaan agama. Bagaimana Gereja mencari jalan keluar dan terbebas dari permasalahan tersebut? Dalam hal ini diperlukan pemahaman doktrin agamanya sendiri dan ajaran agama-agama lain secara mendalam. Tidak perlu mencampuri dan berkomentar tentang ajaran serta simbol-simbol agama lain apabila memang tidak memahaminya dengan benar. Apakah kelompok yang merasa diri mayoritas bisa semaunya menista dan menaburkan kebencian atas nama agama terhadap yang minoritas? Piagam Najran dan Madinah berikut ini dapat memberikan pencerahan dan pembelajaran terhadap benturan-benturan terhadap keberadaan agama-agama lain.

2.1.1.4 Piagam Najran dan Madinah : Landasan bagi Kemajemukan

Perjanjian Najran antara Nabi Muhammad SAW dengan umat Nasrani berisikan (1) akan membela, melindungi dan membantu umat Nasrani hingga akhir zaman sebagaimana Nabi SAW membela keluarga dekatnya, (b) bila umat Nasrani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin perbaikan/ merenovasi gereja-gereja, maka hendaklah mereka perlu dibantu, bukan berupa hutang yang dibebankan, tetapi berupa dukungan dan pemberian, (c) bila ada seorang muslim ingin menikahi wanita nasraniah, maka dia boleh

menikahnya dengan syarat tidak boleh memaksanya serta se-izin keluarganya, dan kalau dia sudah menikah maka tidak boleh diganggu gugat agamanya serta diperbolehkan menjalankan agamanya, (d) tidak boleh umat nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam, (e) hendaklah umat Kristiani diberi perlindungan dan kasih sayang serta dicegah segala keburukan yang bisa menimpa kapan pun dan di mana pun. Inilah janji Rasulullah SAW kepada umat Kristiani sampai akhir jaman. Hal serupa pernah ditegaskan juga oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA yang selalu mengedepankan kesejukan dan kedamaian dalam ceramah-ceramahnya.

Hal senada ditegaskan pula dalam Piagam atau Konstitusi Madinah sebagai landasan yang menjamin kerukunan, kedamaian, saling menghormati dan bekerjasama antar-pemeluk agama yang berbeda di tengah keragaman di Kota Madinah dan sekitarnya. Mereka memperlakukan sesamanya, bukan berdasarkan hubungan darah, melainkan sebagai saudara dalam kasih sayang dan kemanusiaan (bdk. Peter B. Sarbini: 2016).

2.1.1.5 Gereja yang selalu membarui diri

Sikap pembaruan dan keterbukaan yang merangkul penuh persaudaraan dari perjanjian Najran serta Piagam Madinah di atas sejalan dengan kehadiran dan karya-karya Gereja meskipun dalam peziarahannya menghadapi aneka ragam benturan dan kesulitan. Namun demikian semangat dan jiwa pembaruan serta penghargaan terhadap keragaman agama-agama lain dan kepercayaan tidak pernah pudar. Hal ini sungguh nyata dan segar dari buah-buah Konsili Vatikan II.

Paus Yohanes XXIII pada waktu mengumumkan rencana diadakannya Konsili Vatikan II bermaksud dan bertujuan ingin membuka jendela Gereja agar kita bisa melihat keluar dan mereka yang ada di luar Gereja dapat melihat ke dalam Gereja Katolik. Setelah perjalanan dan kehadiran Gereja sekian lama, jendela-jendela Gereja sungguh sudah terbuka sehingga gereja bisa melihat realitas di luar gereja? Sebaliknya, apakah umat di luar Gereja dapat melihat ke dalam Gereja?

Konsili Vatikan II (1962-1965) membawa angin segar dan pembaruan (*aggiornamento*) yang luar biasa bagi Gereja Katolik dan dunia untuk merajut serta merawat persaudaraan, menghargai dan menghormati perbedaan di tengah keragaman. Hal ini terbukti nyata dalam Dokumen *Nostra Aetate (NA)* yang berisikan pentingnya (a) menjalin, membina dan meningkatkan hubungan baik dengan kemajemukan umat beragama atau kepercayaan lain yang diwujudkan dalam sikap hormat yang tulus, (b) tidak menolak apa pun yang benar dan suci dalam agama-agama lain (NA. 2), (c) semua agama mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu Tuhan sendiri (NA. 1), (d) Gereja atau umat Katolik menjalin dan merajut persaudaraan dengan semua orang tanpa diskriminasi (NA. 5), (e) Gereja hidup berdamai dengan semua orang.

Dialog dan kerja sama dengan agama-agama serta kepercayaan lain merupakan lompatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan keadaan sebelum Konsili Vatikan II yang menggambarkan Gereja Katolik sangat tertutup dari agama dan kepercayaan lain. Lompatan dan sikap baru ini dilandasi pembaruan Konsili Vatikan II terhadap kebebasan beragama serta keselamatan yang bersifat inklusif dari Deklarasi *Dignitatis Humanae dan Nostra Aetate*.

Keterlibatan Gereja Katolik dalam kehidupan bermasyarakat saat ini merupakan buah dari Konsili Vatikan II tentang Gereja yang terlibat. Gereja bukanlah komunitas yang terpisah dan terasing dari dunia. Gereja sudah semestinya terlibat dalam dinamika kehidupan di dunia ini. Kalimat awal dari *Gaudium et Spes* (Kegembiraan dan Harapan) menegaskan bahwa duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, utamanya kaum miskin dan siapa saja yang menderita merupakan kegembiraan dan harapan, suka serta kecemasan para murid Kristus juga.

Dalam pembaruan kehidupan beragama, ajaran Gereja Katolik dengan tegas mengecam setiap bentuk diskriminasi dan fanatisme sempit dalam beragama, termasuk penganiayaan berlatar belakang agama, suku, budaya dan lain sebagainya. Selain itu, Paus Fransiskus menegaskan bahwa Gereja Katolik harus terus-menerus tanpa mengenal lelah membarui dirinya, antara lain melalui dialog dan relasi persaudaraan untuk berjumpa dengan semua kalangan, yaitu agama-agama lain dan dunia. Pentingnya dan urgensi dialog, serta membangun persaudaraan serta bekerjasama dengan umat beragama lain bertujuan mencari jalan keluar untuk memerjuangkan kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil dan merdeka, serta mencari solusi bersama mengatasi atau menyelesaikan pelbagai persoalan.

Tentu ada banyak cara dan terobosan yang bisa dilakukan Gereja untuk pembaruan. Misalnya, pembaruan dalam pendidikan agama sangat diperlukan untuk merawat kemajemukan, membangun harmoni, perdamaian, kerukunan dan persatuan. Pembaruan dalam pola pikir (*mindset*) sangat penting. Orang yang tidak memahami dengan baik, benar dan mendalam tentang agamanya sendiri serta agama orang lain akan mudah terseret kepada ujaran kebencian yang berujung pada penghinaan, merendahkan dan menjelek-jelekkan agama lain. Pemahaman ajaran agama secara parsial dengan pola pikir yang salah dan picik ("*sumbu pendek*") benar-benar berbahaya baik bagi dirinya, kelompoknya maupun pihak lain. Selain itu, pemahaman dan penafsiran doktrin agama yang tekstual, dogmatis tanpa memahami konteks dan tidak disertai tinjauan kritis, justifikatif, eksklusif dan ahistoris menyebabkan sikap intoleran serta diskriminatif. Faktor lain yang sangat penting untuk dibarui yaitu pergaulan dan wawasan yang sempit (*narrow minded*) terkait kehidupan beragama yang sering menyeret orang kepada sikap antipati, eksklusif, ekstrim dan brutal yang disertai tindakan-tindakan radikal di tengah perbedaan. Dengan bersikap inklusif, pluralis dan moderat, maka hal itu akan mempermudah untuk membangun

perdamaian serta kesejahteraan, utamanya sikap saling menghormati dan bekerjasama antar-umat beragama tanpa membeda-bedakan.

3. Simpulan

Gereja di Indonesia de facto merupakan minoritas, kurang dikenal, sehingga kehadirannya sering dirasakan tidak relevan dan tidak memberi pengaruh. Untuk itu Gereja harus memperkenalkan diri dan terlibat penuh di tengah budaya, agama, kepercayaan dan beragam manusia. Keberadaan Gereja terkait erat dengan manusia dan persoalannya, serta menjadi tanda kegembiraan dan harapan di tengah duka serta kecemasan, utamanya di tengah kaum miskin dan siapa saja yang menderita. Umat Katolik perlu menjadi tanda pengharapan dan kegembiraan bagi seluruh umat manusia (*bdk. Gaudium et Spes* artikel 1). Bisakah harapan dan cita-cita *Gaudium et Spes* ini terwujud nyata jika Gereja masih sibuk dengan birokrasinya sendiri serta menjauhkan atau memisahkan diri dari dunia?

Peziarahan dan karya-karya pelayanan Gereja tidak pernah akan terbebas dari aneka macam kesulitan, tantangan dan ancaman. Gereja tentu tidak akan mampu mengatasinya tanpa merangkul dan melibatkan pihak lain. Beragam perbedaan dari pihak lain seharusnya jangan dipandang dan diperlakukan sebagai lawan serta musuh, melainkan sebagai saudara dalam kasih dan kemanusiaan. Gereja harus senantiasa membuka dirinya dan memerlakukan pihak lain secara manusiawi dan penuh kasih sayang karena pada dasarnya semua manusia adalah saudara. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam dokumen-dokumen dan ajaran Gereja, misalnya ensiklik *Fratelli Tutti*. Dalam dokumen Konsili Vatikan II (*Nostra Aetate*), Gereja Katolik menghargai dan menaruh hormat yang tinggi kepada agama-agama tanpa membeda-bedakan. Kelompok minoritas agama apa pun sangat dihargai dan tidak pernah dipandang rendah oleh Gereja Katolik. Mereka tidak boleh ditempatkan pada level inferior dan periferial, melainkan harus diperlakukan pada posisi sejajar, baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik maupun agama.

Gereja Katolik harus berani keluar dari zona nyaman dan mapan untuk berdialog dengan saudara-saudari lintas agama serta kepercayaan di sekitar kita. “*Sikap keterbukaan dalam kebenaran dan kasih harus menjadi ciri dialog dengan pemeluk agama-agama non-Kristen, kendati berbagai benturan, rintangan serta kesulitan, terutama bentuk-bentuk fundamentalisme di kedua belah pihak*” (Evangeliu Gaudium, 250). Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diharapkan mampu merajut persaudaraan sejati dengan siapa saja yang berkehendak baik. Sebab, kita semua bersaudara, bukan persaudaraan karena hubungan darah dan iman yang sama, melainkan persaudaraan dalam kemanusiaan. Menyadari hal itu tidak ada alasan lagi menciptakan pelbagai upaya berupa benturan-benturan yang menghalangi bahkan mempersulit keberadaan Gereja Katolik khususnya dan karya-karyanya.

4. **Kepustakaan** **Beberapa Bacaan**

- Bosko, Rafael Edy dan M. Rifa'i Abduh (Penerj.) (2010), *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?* Yogyakarta : Kanisius.
- B. Sarbini, Peter (2015), *Mahalnya Toleransi, dalam Serba-Serbi Misi SVD-SSpS., Simposium 2.* Januari. Malang : Aditya Wacana.
- _____ (2016), *Pesona Islam.* Malang: Widya Sasana Publication.
- Gesch, Patrick F., SVD (Ed.) (2009), *Mission and Violence. Healing the Lasting Damage.* Madang, Papua New Guinea: DWU Press.
- Murthado (Penerj.), Hawin (2004), *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam.* Solo: Era Intermedia.
- Setyowati, Agnes, Awas (2021), *Radikalisme Menyasar Generasi Muda Bangsa Indonesia,*
dalam KOMPAS 20/9/2021.
- Solo, Markus (Penerj.) (2015), *Dewan Kepausan untuk Dialog Antarumat Beragama, Dialog dalam Kebenaran & Kasih, Orientasi Pastoral untuk Dialog Antarumat Beragama.* Jakarta : Komisi HAK KWI
- Suminar, D. Lintang dan Tim IMPULSE (eds.) (2010), *Mencungkil Sumbatan Toleransi.* Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, M. Abduh (2018), “*Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kristis tentang Eksistensinya Masa Kini)*” dalam *Sulesana, Jurnal Wawasan Keislaman UIN Alauddin Makassar*, Vol. XII/ No. 1.
- Wuritmur, Amrosius (2018), *Gereja Berdialog Menurut Ajaran Magisterium.* Jakarta: OBOR.
- Zada, Khamami (2002), *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia,* Jakarta : Teraju.